Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi VI
Minggu ke-3 Januari
(12 s.d. 18 Januari 2023)
2023

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN DOMESTIK TERHADAP HARGA CPO

Yosephus Mainake
Analis Legislatif Ahli Pertama
yosephus.mainake@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Harga salah satu komoditas andalan Indonesia yakni minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*/CPO) terus mengalami penurunan. Pada periode 4-13 Januari 2023, harga CPO terus melemah. Pengecualian terjadi pada 9 Januari 2023 di mana harga CPO mengalami peningkatan.Selebihnya harga CPO mengalami penurunan 5,3 persen dari level psikologis MYR4.000 per ton. Harga CPO mengalami penurunan 44,3 persen dibandingkan harga pada 29 April 2022 yang tercatat MYR7104 per ton. Meskipun saat ini harga CPO mengalami penurunan namun kedepannya harga CPO diperkirakan akan naik dari harga saat ini akibat adanya perubahan kebijakan domestik yaitu implementasi program B30 menjadi B35 dan penerapan aturan baru terkait ekspor CPO.

Salah satu faktor meningkatnya kembali harga CPO disebabkan oleh kebijakan domestik dalam menambah volume biodiesel Indonesia dari B30 menjadi B35. Pemerintah akan mengimplementasikan B35 mulai 1 Februari 2023. Program B35 diterapkan sebagai langkah antisipasi lonjakan harga minyak dunia serta menekan impor solar. Mandatori B35 diperkirakan akan meningkatkan konsumsi CPO Indonesia menjadi 11,44 juta ton, naik 9,6 juta ton dibandingkan saat mandatori B30. Implementasi B35 Indonesia akan mengubah penawaran dan permintaan pasar global CPO, dimana Indonesia sebagai produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia.

Kenaikan harga CPO juga terjadi akibat pembatasan ekspor CPO melalui skema *domestic market obligation* (DMO). Pengetatan tersebut dilakukan dengan menurunkan rasio volume ekspor dari volume DMO yang dijalankan perusahaan. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengumumkan bahwa rasio kuota hak ekspor minyak sawit dipangkas mulai 1 Januari 2023 dalam rangka mengamankan stok domestik. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso, pemerintah akan memangkas jumlah yang dapat diekspor produsen menjadi enam kali dari pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau DMO. Adapun ketentuan yang berlaku sebelumnya menetapkan rasio kuota hak ekspor CPO dan produk turunannya yakni delapan kali dari DMO CPO dan/atau minyak goreng (1:8). Artinya, pelaku usaha mendapatkan izin ekspor CPO delapan kali lipat dari volume DMO yang dijalankan di dalam negeri. Namun, dengan terbitnya aturan baru ini, pelaku usaha hanya diizinkan untuk melakukan ekspor enam kali lipat dari volume DMO yang dijalankan di dalam negeri. Aturan ini diberlakukan untuk mengamankan stok dalam negeri agar tidak tejadi kelangkaan minyak goreng dalam negeri.

Secara global kenaikan harga CPO juga akan terjadi akibat ancaman Malaysia untuk menghentikan ekspor CPO ke Uni Eropa (UE) sebagai bentuk protes diskriminasi kawasan tersebut terhadap komoditas CPO. Undang-undang UE yang baru akan mengatur pembelian atau penjualan CPO secara ketat sebagai upaya untuk melindungi hutan. UU tersebut akan melarang minyak sawit dan komoditas lain yang ditengarai melakukan deforestasi. Pengecualian diberikan jika merasa bisa menunjukkan komoditas tersebut tidak ikut andil

dalam merusak hutan. Malaysia dan Indonesia mendesak UE menerapkan tindakan perdagangan yang *fair* dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap sawit.

Atensi DPR

Implementasi program B35 dan pengaturan ekspor CPO diharapkan dapat meningkatkan harga CPO. Meskipun harga CPO akan meningkat, namun belum semua petani sawit merasakan manfaat kenaikan harga tersebut. Dampak kenaikan harga CPO baru dapat dinikmati oleh petani plasma atau petani yang terintegrasi dengan perusahaan sawit, sedangkan petani kelapa sawit swadaya atau mandiri belum merasakan dampak positif kenaikan harga tersebut. Oleh karenanya DPR RI, khususnya Komisi VI melalui fungsi pengawasan perlu memastikan bahwa petani sawit mandiri/swadaya terlibat dalam pelaksanaan kebijakan program B35 tersebut. Pembenahan rantai tata niaga CPO untuk petani mandiri/swadaya, penting dilakukan. Di samping itu BUMN diharapkan dapat segera memiliki pabrik biodiesel sehingga dapat menjalin kemitraan dengan petani sawit mandiri/swadaya.

Sumber

Bisnis Indonesia, 16 Januari 2023;
bisnisindonesia.id, 17 Januari 2023;
cnbcindonesia.com, 17 Januari 2023;
infosawit.com, 16 Januari 2023;
Kompas, 16 Januari 2023.

IsuSepekan
Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official

EDITOR
Polhukam Simela Victor M., Prayudi, Novianto M. Hantoro
Ekkuinbang Sri Nurhayati Q., Sulasi Rongiyati, Rafika Sari, Eka Budiyanti, Dewi Wuryandani
Kesra Achmad Muchaddam F., Yulia Indahri, Rahmi Yuningsih

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S.
Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake
Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023